

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang

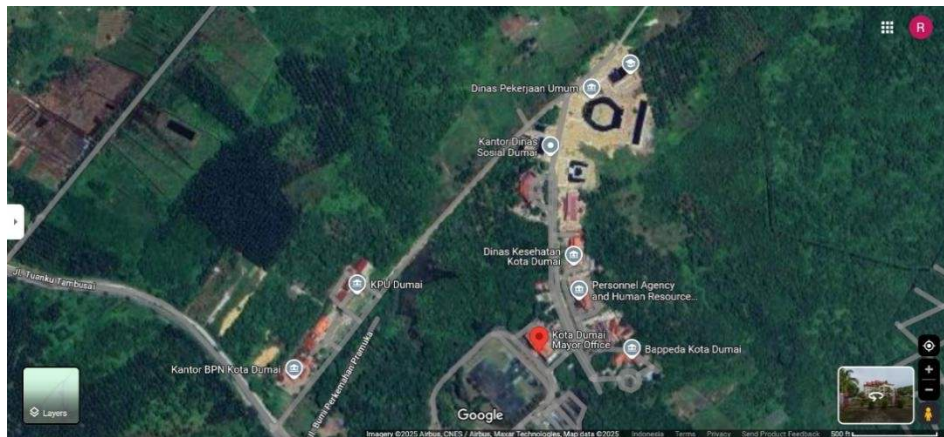
1.1.1 Latar belakang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai di bentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 November 2023 dan mencabut Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Dumai. Pembentukan Dinas ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Dumai untuk mengoptimalkan pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang, guna mendukung pembangunan yang terencana dan berkelanjutan di wilayah Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2023, pada Pasal 2 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, menyatakan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Organisasi perangkat daerah dipimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki beberapa bidang yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang, berikut adalah pembagian bidang yang ada:

1. **Bidang Pertanahan:** Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk pengaturan, pengendalian, dan penanganan masalah pertanahan di Kota Dumai.
2. **Bidang Tata Ruang:** Mengelola perencanaan dan pengembangan tata ruang kota, memastikan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal): Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pertanahan dan penataan ruang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Bidang Cipta Karya: Bertanggung jawab atas pengembangan dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum yang mendukung tata ruang kota.



Gambar 1.1 Lokasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
(sumber Google maps)

1.1.2 Latar Belakang PT. Loeh Raya Perkasa

Perusahaan PT. Loeh Raya Perkasa didirikan pada tahun 2010 di Kota Banda Aceh. Meskipun berbasis di Aceh, perusahaan ini aktif menjalankan proyek-proyek di berbagai kota dan provinsi di seluruh Indonesia, bahkan di luar Pulau Sumatera. Portofolio proyek mencakup berbagai jenis, seperti perumahan, pertokoan, sarana ibadah, perkantoran, pendidikan, pelabuhan perikanan, instalasi tenaga listrik untuk gedung dan pabrik, serta pembangunan stadion olahraga outdoor dan infrastruktur sipil seperti jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandar.

Dengan pengalaman melayani berbagai sektor termasuk pemerintahan, perusahaan swasta, yayasan, dan individu, kami yakin dapat terus meningkatkan

layanan kami dari waktu ke waktu. PT. Loeh Raya Perkasa unggul dalam memiliki tim profesional berpengalaman, menerapkan teknologi konstruksi terkini, dan menjalin kemitraan strategis dengan pemasok serta mitra bisnis. Pendekatan kolaboratif dan solusi berorientasi pada kebutuhan klien membuat PT. Loeh Raya Perkasa menjadi pilihan utama dalam industri ini.

Pemerintah kota Dumai dalam hal ini melalui Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, bidang Cipta Karya pada tahun 2024 telah memprogramkan pekerjaan Pembangunan Stadion Porprov Kota Dumai. Proyek Pembangunan stadion Porprov Kota Dumai ini berada di, Jln. Arifin Ahmad – Jln. Prima Jaya, Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur, Dumai, Riau.

PT. Loeh Raya Perkasa merupakan kontraktor pelaksana pada proyek Pembangunan Stadion Porprov Kota Dumai, proyek ini dibangun untuk memenuhi fasilitas olahraga oleh warga kota dumai dan membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat umum.

Untuk proyek ini, PT. Loeh Raya Perkasa yakin dapat melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan biaya yang efisien. PT. Loeh Raya Perkasa akan menerapkan metode yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang sangat krusial dan membutuhkan perencanaan yang matang, pengaturan yang baik, serta pengawasan yang optimal, agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan, tepat waktu, dan memenuhi standar yang diinginkan.

Dalam tahap pelaksanaan, semua pekerjaan di lapangan mengikuti rencana yang telah dibuat oleh pihak perencana seperti gambar rencana dan segala detailnya, jenis material, dan dokumen lainnya. Tahap selanjutnya kontraktor mengerjakan *shop drawing* sebagai gambar pelaksana dengan ruang lingkup serta detail yang lebih sempit kemudian untuk tahap akhir kontraktor membuat *as built drawing* sebagai gambar akhir sesuai dengan yang ada di lapangan yang di gunakan sebagai laporan akhir.

Tabel 1.1 Data Perusahaan

Nama Perusahaan	PT. Loeh Raya Perkasa
Alamat Perusahaan	Jln. Lingkar – blang paseh, Kel. Blang paseh, Kec. Sigli, Kab. Pidie, Prov. Aceh
Tahun Didirikan	2020
No. Hp Perusahaan	0823 6379 1999
Negara	Indonesia
Provinsi	Aceh
Nama Direktur	Zulfadliasyah, SE
Alamat e-mail Perusahaan	loehraya-perkasa@yahoo.co

Tabel 1.2 Data Pemilik Perusahaan

PEMIMPIN PERUSAHAAN	JABATAN
Zulfadliasyah, SE	Direktur Utama
Muhammad Rizal Fahlevi	Direktur
Nona Yunita	Komisaris

PT. Loeh Raya Perkasa merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak pada jenis usaha kontraktor. Perusahaan ini juga menjalankan usahanya pada bidang kontruksi bangunan Pelabuhan perikanan, kontruksi bangunan prasarana sumber daya air, kontruksi bangunan Pelabuhan bukan perikanan, kontruksi bangunan sipil lainnya Ytdl, kontruksi jaringan irigasi, kontruksi jalan raya, kontruksi jalan raya, kontruksi gedung tempat tinggal.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan proyek pembangunan Stadion Porprov Dumai tahun 2024 adalah menyelesaikan tahap pertama, yang mencakup pembanguna lapangan sepak bola berstandar Nasional, running track atletik berstandar Internasional, pagar BRC, dan pondasi tribun. Pada tahap selanjutnya, akan dilakukan pembangunan tribun penonton serta fasilitas pendukung lainnya guna mendukung pergelaran Porprov 2026 di Kota Dumai.

Manfaat Pembangunan stadion Porprov Kota Dumai ini bertujuan untuk mendukung pengembangan olahraga dan sebagai wadah bagi Masyarakat untuk beraktivitas. Stadion ini juga akan menjadi fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan pekan olahraga provinsi (Porprov) yang akan berlangsung di kota dumai.

Tujuan dari Pembangunan stadion Porprov Kota Dumai adalah sebagai berikut,

- a. Memberikan wadah dan fasilitas untuk pengembangan olahraga
- b. Menyediakan lapangan sepakbola berstandar nasional dan *running track* berstandar internasional.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

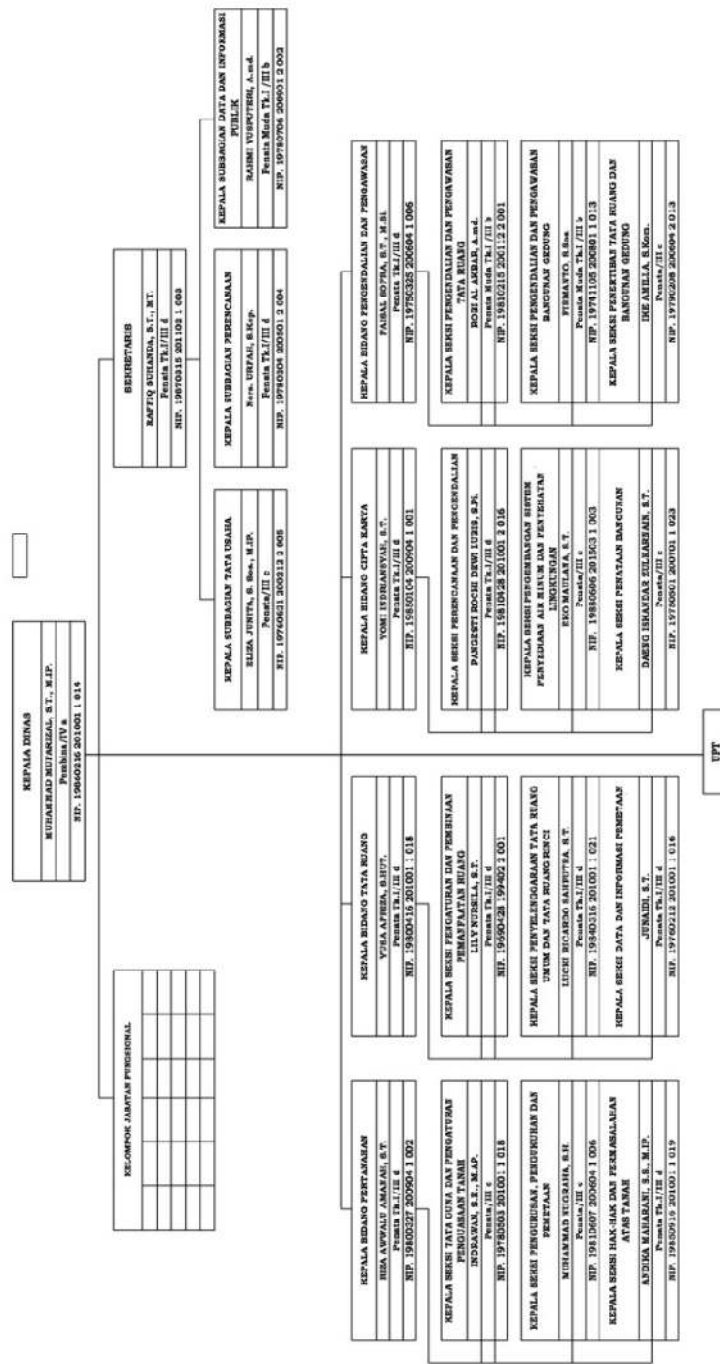
1.3.1 Pengertian Umum

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di batasi.

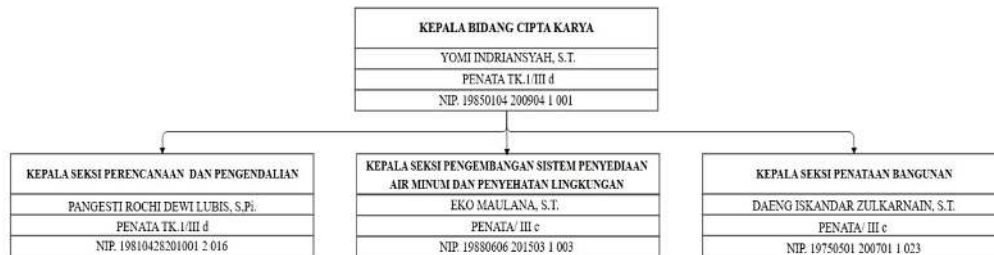
1.3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

Berikut adalah struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai :

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI



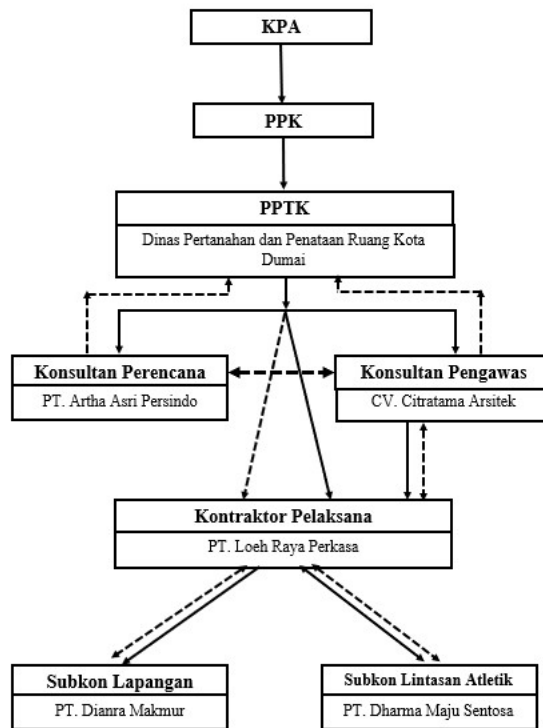
Gambar 1.2 Srtuktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
(Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai)



Dalam pelaksanaan proyek pembangunan telah dibentuk struktur organisasi yang berhubungan kerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan adanya kerja sama yang baik maka akan tercapai hasil yang baik, sesuai dengan perencanaan yang diterapkan demi menjamin kelancaran pembangunan proyek tersebut. Adapun unsur - unsur yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komisi (PPK)
3. Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)
4. Konsultan Perencana
5. Konsultan Pengawas/ MK
6. Kontraktor Pelaksana (*Contractor*)

Untuk pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan kerja sama antara unsur-unsur yang terlibat di dalamnya seperti diperlihatkan pada gambar 1.3 Skema hubungan kerja secara hukum.



Gambar 1 3 Skema Hubungan kerja secara hukum
(Sumber : Dokumen perusahaan, 2024)

Keterangan : Hubungan Instruksi (perintah)

Hubungan Koordinasi

Berikut ini akan diuraikan struktur organisasi dari masing-masing perusahaan.

1. Pengguna Anggaran (PA)

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengguna anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Instutusi Pengguna APBA/APBD. Sedangkan kuasa pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBA atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK dalam proyek adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yang diberi kewenangan oleh PA/ KPS untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah menjadi bagian dari pengelola keuangan K/ L.

Dalam Pasal 11 ayat 3 dan 4 Peppres Nomor 16 tahun 2018 beserta peraturan perubahannya yaitu Perpres 12 Tahun 2021, bahwa dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, yang meliputi:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan
- b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- d. Menetapkan rancangan kontrak
- e. Menetapkan HPS
- f. Menetapkaan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- i. Mengendalikan kontrak.
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan.
- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan
- l. Menilai kinerja penyedia
- m. Menetapkan tim pendukung

n. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan

o. Menilai kinerja penyedia

3. Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 74, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PP Nomor 12 Tahun 2019 ini menyempurnakan pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menjaga tiga pilar tata kelola keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Penetapan PPTK didasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah (Pasal 13 Ayat (1)). PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya (Pasal 13 Ayat (2)).

Dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (2), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “membantu tugas” adalah melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan,

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan,

c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan, dan

d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan.

4. Konsultan Perencana

Konsultan perencana (*consultan/designer*) adalah suatu badan yang bergerak dalam bidang perencanaan konstruksi dan menerima tugas dari pemilik proyek untuk membuat perencanaan dari suatu konstruksi tertentu. Konsultan pengawas dari proyek pembangunan Stadion Poprov Kota Dumai adalah PT. Artha Asri Persindo. Adapun tugas dan tanggung jawab konsultan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan secara lengkap, yang mencakup gambar rencana, rencana kerja dan syarat-syarat perhitungan struktur, serta rencana anggaran biaya,
- b. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada pemilik proyek serta pihak kontraktor terkait pelaksanaan pekerjaan,
- c. Menyampaikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor mengenai hal-hal yang kurang jelas dalam gambar, rencana kerja dan syarat-syarat,
- d. Membuat gambaran revisi apabila terjadi perubahan dalam perencanaan.

5. Konsultan Pengawas/ MK

Konsultan pengawas adalah badan usaha yang bertugas mengawasi pelaksanaan konstruksi proyek. Konsultan pengawas dari proyek pembangunan Stadion Poprov Kota Dumai adalah CV. Citratama Arsitek. Adapun tugas dan tanggung jawab pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja
- b. Melaksanakan pengawasan dalam perjalanan pelaksanaan proyek,
- c. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek,
- d. Konsultan pengawas memberikan saran kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan,
- e. Mengoreksi dan menyetujui shop drawing yang diajukan kontraktor.

6. Kontraktor Pelaksana (*Contractor*)

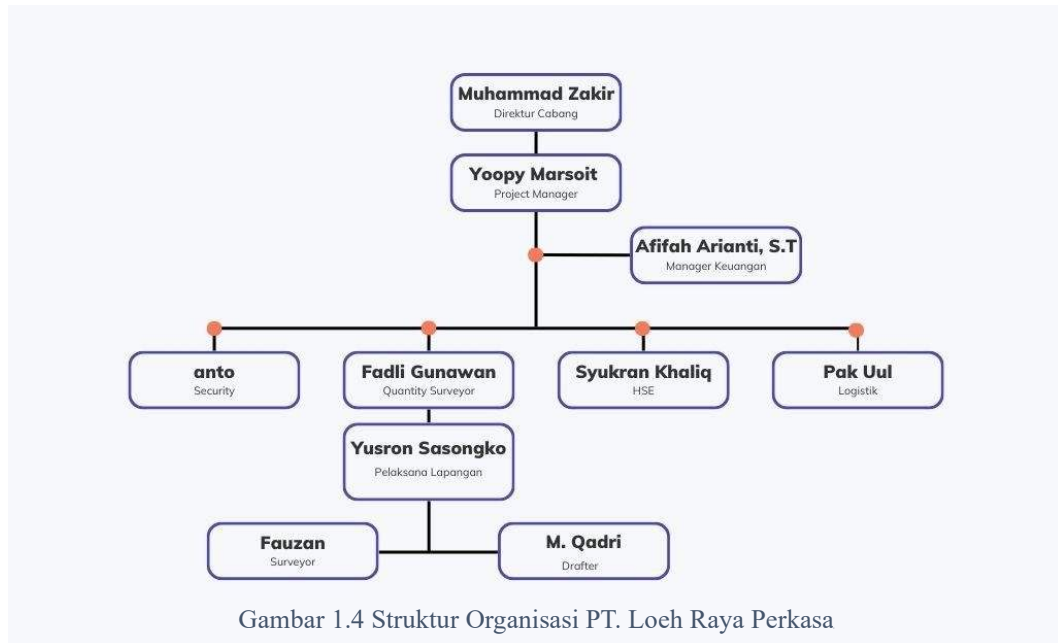
Pelaksana (*contractor*) adalah perorangan atau badan hukum yang dipercaya untuk melaksanakan pembangunan dan memiliki usaha yang bergerak di bidang jasa kontruksi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya serta mempunyai tenaga ahli teknik dan sarana peralatan yang cukup. Penunjukan pelaksanaan proyek dilaksanakan melalui proses pelelangan, pemilik proyek telah mempercayakan pelaksanaan proyeknya kepada pihak PT. Loeh Raya Perkasa. Adapun tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa,
- b. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang diwajibkan dalam peraturan untuk pelaksanaan pekerjaan (*shop drawing*),
- c. Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan dari pekerjaan,
- d. Menyelesaikan dan menyelenggarakan pekerjaan tepat pada waktu,
- e. Mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut dalam tanggung jawab pelaksana,
- f. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan.

1.3.3 Struktur Organisasi PT. Loeh Raya Perkasa

Struktur organisasi proyek adalah skema atau gambaran alur kerja sama yang berfungsi untuk mendukung proses pencapaian tujuan dalam suatu proyek. Struktur ini disusun untuk menjelaskan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dalam pelaksanaan sebuah proyek, terdapat berbagai unsur atau pihak yang terlibat. Unsur-unsur tersebut memiliki hubungan kerja sama yang saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

Berikut adalah struktur organisasi PT. Loeh Raya Perkasa:



Tugas Masing-Masing Bagian Struktur Perusahaan

1) Direktur Cabang

Direktur PT adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan. Direktur memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan memimpin perusahaan, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Adapun tugas direktur adalah sebagai berikut :

- a) Merencanakan, mengarahkan dan mengawasi semua aspek operasional perusahaan
- b) Menetapkan kebijakan, rencana bisnis, anggaran, dan keputusan lainnya
- c) Bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh keteledoran mengelola Perusahaan
- d) Menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis.

2) *Project Manager*

Manager proyek adalah orang yang di beri wewenang dan tanggung jawab oleh kontraktor untuk memimpin, mengatur dan mengawasi serta membuat keputusan yang terbaik dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Kualifikasi pendidikan minimal seorang project manager adalah berpendidikan S2 Teknik, memiliki Surat Keahlian Kerja (SKA) Ahli Utama, di bidang konstruksi bangunan gedung, dan memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun dibidangnya. Manager proyek adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi dilapangan, adapun tugasnya adalah:

- a) Membuat perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek
- b) Mengatur kegiatan operasional pelaksanaan proyek
- c) Melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan proyek
- d) Mengontrol pelaksanaan operasional pelaksanaan proyek

3) Manajer keuangan konstruksi

Manajer keuangan konstruksi (CFM) adalah perwakilan perusahaan untuk urusan keuangan. Tugas dan tanggung jawab manager keuangan adalah :

- a) Merencanakan anggaran untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana secara finansial
- b) Mengawasi pengeluaran
- c) Memastikan proyek selesai sesuai target biaya dan waktu
- d) Membuat jadwal pembayaran untuk setiap tahapan proyek
- e) Memonitor *cash flow* atau arus kas proyek secara teratur
- f) Mencatat transaksi keuangan sehari-hari secara akurat dan tepat waktu

4) *Quantity Surveyor*

Quantity surveyor (QS) adalah profesional di bidang konstruksi yang bertugas mengelola biaya proyek konstruksi. QS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

proyek konstruksi selesai sesuai anggaran dan jadwal yang ditetapkan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Memperkirakan biaya proyek, termasuk bahan, tenaga kerja, dan peralatan
- b. Menyiapkan dokumen tender dan kontrak
- c. Memantau dan mengelola biaya proyek selama konstruksi
- d. Membantu menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek
- e. Melakukan studi kelayakan finansial untuk proyek
- f. Menganalisis syarat dan ketentuan dalam kontrak
- g. Memprediksi potensi risiko dalam proyek
- h. Menilai pekerjaan konstruksi yang telah selesai
- i. Mengawasi pembayaran Memastikan proyek memenuhi standar hukum dan kualitas.

5) Pelaksana Lapangan

Pelaksana lapangan proyek adalah badan yang bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan di lapangan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk memenuhi target kerja
- b. Mengawasi pekerjaan sesuai dengan bestek
- c. Melaksanakan survei di lapangan
- d. Mengkoordinasikan tim lapangan Menjaga harmoni kerja tim internal dan eksternal
- e. Memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan standar kualitas

6) *Drafter*

Drafter proyek adalah profesional yang membuat gambar teknis atau blueprints yang merinci konstruksi, perakitan, atau manufaktur dari suatu proyek. *Drafter* bekerja sama dengan arsitek, engineer, dan profesional lainnya untuk menciptakan rencana dan

gambar yang digunakan dalam proses konstruksi. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengimajinasikan atau merealisasikan bayangan ke dalam sebuah gambar yang lebih mudah dimengerti dan mudah dipahami
- b. Mendetailkan dan memperjelas gambaran atau rancangan awal yang telah dibuat arsitektur, desainer atau engineer
- c. Menggunakan software atau program Computer Aided-Drafting (CAD) dalam mengerjakan gambar yang dibuatnya
- d. Ikut mengkoordinasikan hasil pekerjaannya kepada pihak-pihak yang berkaitan dan berurusan dengan desain dari suatu hal yang dikerjakannya.

7) *Surveyor*

Surveyor adalah tenaga ahli yang memiliki kualifikasi pendidikan teknik sipil minimal D3 dan memiliki Surat Keterampilan(SKT) surveyor. Adapun tugasnya antara lain:

- a. Mengukur, Surveyor melakukan pengukuran tanah, properti, dan bangunan secara akurat
- b. Mengawasi, Surveyor mengawasi proyek konstruksi untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi
- c. Mengawasi survey lapangan, Surveyor memastikan pengukuran dilakukan dengan prosedur yang benar
- d. Melakukan analisis dan riset, Surveyor menganalisis kondisi tanah, seperti stabilitas tanah, jenis tanah, dan fitur geologis
- e. Melakukan pelaksanaan survei lapangan dan penyelidikan Dan pengukuran tempat-tempat lokasi yang akan dikerjakan terutama untuk pekerjaan.

8) *HSE (Health, Safety, and Environment)*

HSE merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan, serta pengelolaan lingkungan kerja. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menginvestigasi penyebab kecelakaan kerja dan mengevaluasi insiden kecelakaan
- b. Melakukan identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja

9) *Logistik*

logistik adalah sejumlah orang yang bertanggung jawab atas arus keluar masuknya barang dari dan ke dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah supaya kebutuhan produksi perusahaan terpenuhi dengan baik dengan biaya minimal. Adapun tugasnya antara lain:

- a. Menyediakan barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek
- b. Menentukan dan mengelola lokasi penyimpanan
- c. Mencatat barang yang keluar masuk dari tempat penyimpanan
- d. Membuat label pada setiap barang
- e. Menbuat dan menyusun berita acara dan berbagai dokumen terkait
- f. Mengelola tempat penyimpanan material

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan/Industri

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang perusahaan, PT. Loeh Raya Perkasa ini bergerak pada pelaksana jasa konstruksi di bidang:

- a) konstruksi bangunan Pelabuhan perikanan
- b) konstruksi bangunan prasarana sumber daya air
- c) konstruksi bangunan Pelabuhan bukan perikanan
- d) konstruksi bangunan sipil lainnya Ytdl
- e) konstruksi jaringan irigasi
- f) konstruksi jalan raya